



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN DERAJAT OTONOMI
FISKAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DI KOTA PADANG TAHUN 2004 - 2008**

Oleh :

INGRYANI
06 951 004

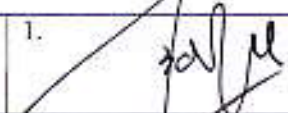
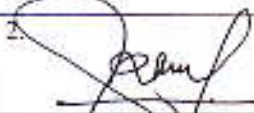

Mahasiswa Program Strata Satu (S - 1) Jurusan Ilmu Ekonomi

*Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat - Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG
2010**

	No.Alumni Universitas	INGRYANI	No.Alumni Fakultas
	BIODATA		
<p>a). Tempat/Tgl lahir: Padang, 08 April 1988 b). Nama Orang Tua: Hendrianto dan Zubaidah c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Ilmu Ekonomi e). No.Bp: 06 951 004 f). Tgl Lulus: 9 Agustus 2010 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 3,00 i). Lama Studi: 4 tahun j). Alamat Orang Tua: Komp. Pratama Indah Cindakir No.3 Bungus Tl. Kabung, Padang – Sumatera Barat</p>			
ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN DERAJAT OTONOMI FISKAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA PADANG TAHUN 2004 – 2008			
<i>Skripsi SI Oleh: Ingryani</i>		<i>Pembimbing: Drs. Abdul Karib, MS</i>	
Abstrak			
<p>Pelaksanaan desentralisasi sejak diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 memberikan kewenangan yang semakin luas kepada daerah untuk memberdayakan diri terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber penerimaan. Pelaksanaan otonomi daerah selama ini tergolong masih lemah dilihat dari indikator PAD yang dimiliki daerah, sementara tingkat ketergantungan perintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Kemampuan daerah dalam mengelola PAD dengan efektif dan efisien menjadi tuntutan yang harus diwujudkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. PAD yang efektif dapat diukur dari perbandingan penerimaan PAD tahun tertentu dengan target PAD pada tahun tersebut, pengelolaan PAD yang efisien diukur dari biaya pemungutan PAD dengan penerimaan PAD dan derajat otonomi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dengan ratio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Padang termasuk kategori sangat efisien yaitu sebesar 4,34%. Efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Padang sudah cukup baik yaitu mencapai 92,75% dan derajat otonomi fiskal Kota Padang masih tergolong rendah yaitu 14,53%.</p>			

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 9 Agustus 2010.
Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 	3. 
Nama Terang	Drs. Abdul Karib, MS	Drs. Zamzami Munaf, MA	Neng Kamarni, SE, M.Si

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi :

Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M. Ec, DEA, Ing
NIP. 130812952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus:

Petugas Fakultas / Universitas Andalas		
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam suatu negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). **World Bank** dalam Mardiasmo (2004 : 18) mendefenisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Sistem ini sangat diperlukan setidaknya oleh dua hal: satu sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di berbagai daerah, kedua sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk berperan aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam koridor - koridor kepentingan nasional.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintahan pada hakekatnya mengemban 3 (tiga) fungsi utama yaitu:

1. fungsi alokasi, meliputi sumber - sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat;
2. fungsi distribusi pembangunan;
3. fungsi stabilisasi yang meliputi, pertahanan keamanan dan ekonomi moneter.

Untuk mewujudkan good governance diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional, maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas - luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tujuan tersebut diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio Efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang selama lima tahun anggaran yaitu dari tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 rata-rata sebesar 4,34% dan setiap tahun anggaran mengalami fluktuasi. Rasio yang berfluktuasi ini menunjukkan bahwa pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dari tahun ke tahun belum cukup efisien. Walaupun demikian biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah semakin proposional dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan. Rasio 4,34% termasuk pada kategori sangat efisien. Dengan demikian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mengelola keuangan daerahnya semakin baik. Walaupun setiap tahunnya biaya pemungutan mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat efisiensi karena realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima dari tahun 2004 - 2008 terus mengalami peningkatan.
2. Rasio efektivitas pendapatan daerah Kota Padang selama lima tahun anggaran (tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun 2008) rata-rata sebesar 92,75% setiap tahunnya. Dengan demikian pemungutan Pendapatan Asli Daerah cenderung sangat efektif, karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai berkisar antara 76 - 100%.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Kota Padang Dalam Angka*. BPS Propinsi Sumatera Barat
- Binder, Brian, B.J. 1984. *Ekonomi Keuangan Indonesia*. Vol.XXXII, No.2.13-25.
- Darumurti, K.D., dan Rauta, Uumbu, 2000. *Otonomi Daerah, Kemarin, Hari ini dan Esok*, Kritis, Vol XII, No.3
- Davey, Kenneth. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, terjemahan Amanullah, dkk, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Devas, Nick, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta : UI Press
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset. 2009. *APBD Kota Padang*. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta : UPP AMP YKPN
- Haryati, Sri. 2006. *Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman*.FE-UII Yogyakarta
- Hirawan, Susiyati B. 1993. *Pengembangan Pola Bantuan Daerah Dalam Repelita VI EKL*. Vol XLI No.3
- Insukiro, dkk, 1994. *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Laporan Penelitian, FE-UGM, Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajat. 2005. *Desentralisasi Fiskal di Indonesia Dilema Otonomi dan Ketergantungan*, Prisma
- Liza, EM. 2004. Skripsi. *Analisis Keuangan Daerah dan Posisi Desentralisasi Fiskal Kabupaten Solok*. FE-UA
- Mamesah, DJ. 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama